

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA MANDINGIN KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Febriani Dewi Anjani¹, Reno Affrian², Selamat Riadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: febriani9670@gmail.com.

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007 menyasar keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, guna memutus kemiskinan antargenerasi. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PKH diterapkan di Desa Mandingin dengan 82 KPM, dengan berbagai kendala ketidakmerataan penyaluran, ketergantungan, minim kemandirian, dan jadwal tak jelas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup efektif hal ini terlihat dari 3 indikator efektif yaitu ketepatan tujuan, proses pelaksanaan yang benar dan kepuasan penerima manfaat. Kemudian 2 indikator tidak efektif yaitu ketepatan sasaran dan efisiensi sumber daya. Disamping itu faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan menunjukan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada dua aspek utama yaitu aspek struktural yang meliputi kordinasi antar lembaga, ketersediaan sarana, validitas data dan kapasitas pendamping, kemudian aspek kultural meliputi pemahaman masyarakat, sikap terhadap bantuan dan komunikasi interpersonal. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlu adanya evaluasi dalam program Keluarga harapan di Desa Mandingin agar penerima manfaat merata di desa tersebut.

Kata Kunci: efektivitas, Program Keluarga Harapan, Desa Mandingin

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH), launched in 2007, targets poor families through conditional cash assistance for education, health, and child welfare to break the intergenerational cycle of poverty. In Hulu Sungai Tengah Regency, PKH is implemented in Mandingin Village with 82 beneficiary families (KPM), facing challenges such as uneven distribution, dependency, limited independence, and unclear schedules. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the effectiveness of the Family Hope Program in Mandingin Village, Barabai Subdistrict, Hulu Sungai Tengah Regency, is moderately effective, as evidenced by three effective indicators: accuracy of objectives, proper implementation process, and beneficiary satisfaction. However, two indicators are ineffective: targeting accuracy and resource efficiency. Additionally, the supporting and inhibiting factors reveal that program effectiveness hinges on two main aspects: structural factors, including inter-agency coordination, availability of facilities, data validity, and companion capacity; and cultural factors, encompassing community understanding, attitudes toward assistance, and interpersonal communication. This research highlights the need for program evaluation in Mandingin Village's Family Hope Program to ensure equitable distribution to all beneficiaries.

Keywords: Effective, The Family Hope Program, Mandingin Village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks, termasuk kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang sering dipahami sebagai kekurangan pendapatan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Mubyarto (2010), kemiskinan adalah standar hidup rendah akibat kekurangan materi dibandingkan norma masyarakat setempat, sementara Maipita (2014), mendefinisikannya sebagai ketidakmampuan membeli barang pokok seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Badan Pusat Statistik (2016) pun menyatakan kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan berdasarkan pengeluaran.

Masalah kemiskinan bersifat universal, menyerang hampir semua negara meskipun dengan tingkat berbeda, dan di Indonesia menjadi tantangan utama pemerintah sejak era kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 (Purwanto, Sumartono and Makmur, 2014). Program Keluarga Harapan (PKH), diluncurkan tahun 2007, merupakan bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan tunai disertai syarat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak guna memutus rantai kemiskinan lintas generasi (Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, 2021, p. 7). Kriteria penerima manfaat (KPM) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, mencakup keluarga miskin dengan ibu hamil/menyusui, anak usia dini/sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia.

PKH dilaksanakan dengan pendampingan sosial, pelatihan keterampilan, dan penyaluran non-tunai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, yang mencakup perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi sosial, serta pelayanan dasar. Kesejahteraan sosial sendiri didefinisikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 sebagai pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk hidup layak serta pengembangan diri. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, data BPS (2025) mencatat 15,6 ribu jiwa miskin (5,8%) pada 2024, sehingga Dinas Kesejahteraan Sosial menerapkan PKH, termasuk di Desa Mandingin Kecamatan Barabai dengan 84 KPM awal yang bergantung pada pertanian, perdagangan, dan kebun.

Meski demikian, pelaksanaan PKH di desa tersebut menghadapi kendala: penyaluran belum merata, pencapaian tujuan belum maksimal karena ketergantungan KPM, kurangnya kemandirian akibat minim pengelolaan sumber daya, serta ketidakjelasan jadwal penyaluran. Fenomena ini mendorong penelitian efektivitas PKH menggunakan teori Budiani (Pertiwi dan Nurcahyanto, 2017), yang mengukur kesesuaian output dengan tujuan melalui ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi, dan pemantauan.

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, sehingga rentan terhadap isu sosial rumit seperti kemiskinan yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan pendapatan yang tak memenuhi kebutuhan hidup harian (Mubyarto, 2010; Maipita, 2014; BPS, 2016). Sebagai masalah global, kemiskinan menantang Indonesia untuk merealisasikan kesejahteraan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 (Purwanto, Sumartono dan Makmur, 2014), dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2007 menysar keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, guna memutus kemiskinan antargenerasi (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021, h. 7). Penyaluran non-tunai diatur Permpres No. 63/2017, melibatkan pendampingan dan pelatihan untuk pemberdayaan. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PKH diterapkan di Desa Mandingin dengan 82 KPM, meski terkendala ketidakmerataan penyaluran, ketergantungan, minim kemandirian, dan jadwal tak jelas.

Penelitian ini menganalisis efektivitas PKH di desa tersebut menggunakan kerangka Budiani (dalam Pertiwi and Nurcahyanto, 2017), yang menilai kesesuaian output dengan tujuan melalui ketepatan sasaran, tujuan, sosialisasi, dan pemantauan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan dan faktor pendukung serta penghambatnya di Desa Mandingin

Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2008, h. 12) bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, tanpa adanya manipulasi atau kontrol terhadap variabel-variabel yang ada. Sasaran penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, pendamping PKH, tiga masyarakat penerima manfaat di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan objek penelitian efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. PKH memberikan bantuan finansial secara langsung kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi mereka dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini juga memiliki komponen pendampingan yang mencakup pendidikan dan kesehatan, di mana keluarga penerima manfaat diharapkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Hidayatulloh, 2020, h. 97–98).

Pelaksanaan PKH melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial, yang bekerja sama untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Meskipun PKH telah berhasil dalam mengurangi kemiskinan di banyak wilayah, tantangan masih ada dalam hal efektivitas dan cakupan program. Beberapa masalah yang sering dihadapi termasuk ketidakmerataan distribusi bantuan, penetapan kriteria yang tepat, dan pemantauan serta evaluasi yang memadai. Untuk itu, perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian dalam implementasi PKH diperlukan agar program ini dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 1 mengatur tentang definisi dan ruang lingkup Program Keluarga Harapan (PKH). Pasal ini menjelaskan bahwa PKH adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemberian bantuan sosial yang bersifat non-tunai, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Program ini mencakup berbagai komponen, termasuk bantuan keuangan langsung, serta intervensi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang bertujuan untuk mendorong perilaku positif dalam aspek aspek tersebut.

Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan suatu mekanisme strategis dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan melalui pemberian bantuan langsung yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini tidak hanya menyediakan bantuan finansial, tetapi juga mencakup intervensi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan mendukung keluarga dalam menjaga akses pendidikan anak-anak dan pemeliharaan kesehatan secara rutin. Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan melalui sistem yang terstruktur dan terkoordinasi, melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta pendamping sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi penerima manfaat.

Tujuan umum dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan dengan cara memberikan bantuan sosial yang bersifat langsung dan terarah. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga melalui

dukungan finansial serta mendorong perilaku yang mendukung peningkatan kualitas hidup, seperti akses pendidikan bagi anak-anak dan pemeliharaan kesehatan (Sugiyana, Kurniansyah dan Rizki, 2021).

Bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) menghasilkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Secara sementara, program ini meringankan beban pengeluaran bagi keluarga miskin, sedangkan dalam jangka panjang, diharapkan mampu menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi lewat perbaikan mutu layanan kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan memainkan peran krusial dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama kalangan kurang mampu, baik oleh pemerintah daerah maupun warga itu sendiri. Penelitian ini tentang penanganan isu sosial menuntut adanya program atau kegiatan yang pas agar masalah dapat diatasi secara tepat dan mendalam. Pendamping PKH serta pemerintah lokal sebagai pelaksana dan pengelola wajib menyusun inisiatif yang sesuai untuk mengurai persoalan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan bagi penerima manfaat, sebab hal itu sangat berperan dalam pengelolaan kemajuan komunitas.

Program Keluarga Harapan (PKH) menekankan dua unsur utama, yakni pendidikan (untuk meningkatkan jenjang pendidikan anak dari rumah tangga miskin) dan kesejahteraan sosial bagi lansia. Sasaran PKH guna meninggikan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan, serta layanan kesejahteraan sosial telah tercapai.

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin dilakukan setiap tiga bulan, atau empat kali setahun, yang diterima oleh para peserta. Jumlah peserta penerima bantuan PKH di desa tersebut mencapai sekitar 82 orang. Kondisi ini tercermin dalam tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Penerima PKH Desa Mandingin

Daftar Penerima PKH Desa Mandingin			
No	Nama	RT	RW
1	Asmah	1	1
2	Halifah	1	1
3	Mastinah	1	1
4	Rusdiana	1	1
5	Sajariah	1	1
6	Endriani	2	1
7	Mastiah	2	1
8	Siti Nikmah	2	1
9	Ramlah	3	1
10	Hamidah	5	1
11	Maria Ulpah	6	1
12	Masrawati	6	1
13	Mastainah	6	1
14	Siti Rusdinah	6	1
15	M.Rahman	6	1
16	Siti Rahmah	6	1
17	Kasmawati	7	2
18	Masiyah	7	2
19	Nurbayah	7	2
20	Rusmayati	7	2
21	Samlah	7	2
22	Tahura	7	2
23	Miskiah	7	2
24	Mistarudin	7	2
25	Saruji	7	2
26	Arbaiyah	8	2

27	Arbawati	8	2
28	Bahrudin	8	2
29	Fatmawati	8	2
30	Masni	8	2
31	Nurtasiah	8	2
32	Sabariah	8	2
33	Samnah	8	2
34	Fuspa Wardani	8	2
35	Asmiah	9	2
36	Mahrta	9	2
37	Mahmudah	9	2
38	Siti Aminah	9	2
39	Amnah	10	2
40	Atnah	10	2
41	Jamilah	10	2
42	Aidah	10	2
43	Halifah	10	2
44	Soleha Normayati	10	2
45	Kastan	11	2
46	Norbayah	11	2
47	Hamdanah	11	2
49	Harti Miliana	13	3
50	Kasmaniah	13	3
51	Muhyar Diana	13	3
52	Jaliah	13	3
53	Misrah	13	
55	Alimi	14	3
56	Fahrurazi	14	3
57	Rahmawati	14	3
58	Saniah	14	3
59	Mahyudin	15	3
60	Masdariah	15	3
61	Rusinah	15	3
62	Umi Kulsum	15	3
63	Siti Sarah	16	3
64	Fatimah	16	3
65	Saudah	16	3
66	Hapsah	17	3
67	Masarpah	17	3
68	Mastiah	17	3
69	Niyah	17	3
70	Siti Saudah	17	3
71	Zakiah	17	3
72	Masdiani	17	3
73	Istiqamah	18	3
74	Kamariah	18	3
75	Norsehan	18	3
76	Nursidah	18	3
77	Salamah	18	3
78	Samlah	18	3

79	Saribah	18	3
80	Siti Hadijah	18	2
81	Siti Ruhanah	18	3
82	Syahrani	18	3

Sumber: Data Dokumentasi Desa Mandingin, 2025

Kemiskinan muncul sebagai masalah yang rumit dan berlapis. Isu ini tidak terbatas pada pendapatan rendah serta pola konsumsi minim, melainkan juga melibatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang buruk. Berbagai aspek kemiskinan itu tercermin melalui kekurangan gizi, akses air bersih terbatas, hunian tidak layak, pelayanan kesehatan kurang memadai, serta pendidikan yang minim.

Pemerintah daerah meluncurkan inisiatif khusus untuk mengatasi kemiskinan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan dari pemerintah atau Kementerian Sosial yang difokuskan pada keluarga miskin atau rentan miskin dengan syarat komponen spesifik agar layak menerima dukungan. Syarat tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Menurut Budiani dalam (Pertiwi dan Nurcahyanto, 2017), efektivitas suatu program ditandai oleh kecocokan antara hasil yang dihasilkan dengan sasaran yang telah dirumuskan. Efektivitas mencerminkan kondisi yang sengaja diciptakan. Selain itu, efektivitas program berupa evaluasi atau ukuran mengenai tingkat keberhasilan kegiatan dalam program tersebut untuk mencapai target awal. Suksesnya program tercermin dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh penyelenggara.

Teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani dalam (Pertiwi dan Nurcahyanto, 2017) yang terdapat empat variabel untuk melihat efektivitas suatu program yaitu:

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran program yaitunya sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran. Sasaran Program Keluarga Harapan adalah Keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang memiliki kriteria penerima Program Keluarga Harapan yaitu kriteria Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam hasil penelitian oleh pendamping menunjukkan bahwa kelompok sasaran secara umum telah sesuai dengan ketentuan program. Masyarakat miskin yang teridentifikasi sebagai penerima manfaat dinilai mampu mengikuti kegiatan yang dipersyaratkan, memahami materi yang diberikan, dan menunjukkan partisipasi aktif dalam proses pendampingan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penetapan sasaran di tingkat lapangan telah berjalan dan kelompok sasaran inti telah terjangkau.

Pernyataan kepala desa juga menguatkan gambaran bahwa program telah menysasar masyarakat miskin yang relevan dengan tujuan PKH. Partisipasi mereka dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan memperlihatkan bahwa sasaran fungsional telah tercapai. Dengan demikian, secara formal, kesesuaian penerima manfaat dengan kriteria program menunjukkan tingkat efektivitas yang baik.

Meskipun program dinilai tepat sasaran secara umum, beberapa temuan lapangan menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima manfaat. Perangkat desa menyampaikan bahwa terdapat warga yang seharusnya memenuhi syarat sebagai penerima PKH, tetapi tidak terdaftar dalam sistem pusat. Sebaliknya, terdapat pula penerima manfaat yang secara sosial ekonomi sudah lebih sejahtera, namun tetap tercatat sebagai penerima dan enggan mengundurkan diri.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakefektifan pada aspek administratif dan pendataan. Ketidaktepatan data menyebabkan alokasi bantuan tidak sepenuhnya mengarah pada rumah tangga yang paling membutuhkan. Kondisi tersebut sesuai dengan evaluasi Budiani bahwa ketepatan sasaran dipengaruhi oleh akurasi data dan mekanisme verifikasi yang berkelanjutan. Ketika sistem pendataan tidak diperbarui secara komprehensif, efektivitas program menjadi berkurang meskipun kegiatan pendampingan berjalan baik.

Secara keseluruhan, efektivitas PKH pada indikator tepat sasaran di Desa Mandingin menunjukkan kondisi efektif namun belum optimal. Program telah mencapai kelompok miskin yang berhak, terbukti dari partisipasi aktif dan manfaat langsung yang dirasakan. Namun, adanya ketidakbaruan data dan ketidakseimbangan pada proses verifikasi menyebabkan sebagian masyarakat yang membutuhkan belum terakomodasi, sedangkan sebagian penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima manfaat.

Menurut perspektif Budiani, ketidakkonsistenan antara data administratif dan kondisi sosial lapangan menjadi salah satu faktor utama menurunnya tingkat ketepatan sasaran. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program perlu diarahkan pada pembaruan data terpadu, verifikasi berkala, serta edukasi kepada penerima manfaat untuk mengundurkan diri secara sukarela apabila kondisi ekonomi membaik.

Melihat hal ini berdasarkan teori efektivitas Budiani dalam indikator ketepatan sasaran masih belum efektif hal ini dikarenakan ketidakkonsistenan antara data administratif dan kondisi lapangan yang masih terdapat masyarakat miskin belum menjadi penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Ketepatan Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan PKH di Desa Mandingin secara umum telah tercapai. Program ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga meningkatkan akses pendidikan, mendukung kesejahteraan lansia, dan memberikan edukasi mengenai pengelolaan bantuan.

Penerima manfaat menjelaskan bahwa bantuan PKH membantu biaya sekolah anak, kebutuhan lansia, serta mengurangi beban rumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan PKH baik dalam aspek ekonomi maupun sosial dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu pencapaian tujuan program ini dapat dikategorikan efektif

3. Proses Pelaksanaan yang benar

Pada indikator proses pelaksanaan yang benar berdasarkan hasil wawancara menunjukkan pada tahap persiapan PKH di Desa Mandingin menunjukkan upaya partisipasi dari berbagai pihak seperti pengumpulan data dari kepala dusun, RT/RW dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan usulan penerima manfaat yang dimasukkan ke DTKS dengan penetapan lokasi langsung oleh Kementerian Sosial.

Kemudian pada mekanisme penyaluran dilakukan selama 4 kali setahun kepada 82KK penerima manfaat berdasarkan data yang ada pada hasil penelitian dengan mengikuti urutan Pedoman Program Keluarga Harapan, dimulai dengan pembukaan rekening, sosialisasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera, penyaluran, penarikan, rekonsiliasi, serta pemantauan.

Pelaksanaan pada aspek Pendidikan, program PKH di Desa Mandingin mengurangi putus sekolah melalui bantuan biaya seragam dan alat tulis. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat

Selanjutnya, sosialisasi program merujuk pada kemampuan pelaksana dalam menyebarkan informasi tentang program, sehingga pengetahuan terkait pelaksanaannya dapat sampai kepada masyarakat luas maupun peserta sasaran secara efektif..

Berdasarkan wawancara, kegiatan sosialisasi PKH di Desa Mandingin dilakukan secara rutin melalui rapat bulanan yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan tingkat desa, termasuk ketua RT, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat. Kepala desa menjelaskan bahwa setiap rapat menjadi sarana penyampaian informasi terkait berbagai program pemerintah, termasuk PKH. Penegasan mengenai prinsip keadilan dan kepatuhan pada ketentuan penerimaan bantuan menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif untuk membentuk pemahaman yang benar di tingkat masyarakat.

Pendamping PKH juga menegaskan bahwa sosialisasi diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat penerima manfaat agar mereka memahami rangkaian bantuan serta kewajiban yang harus dipenuhi. Secara keseluruhan sosialisasi program di Desa Mandingin dapat dinilai efektif karena dilakukan secara terencana, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program yang merupakan sebagai bentuk peserta program.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemantauan dilakukan secara rutin setiap bulan atau setiap tiga bulan melalui survei rumah, evaluasi kondisi keluarga, dan verifikasi penerimaan bantuan. Proses ini juga mencakup pembaruan data dan peninjauan ulang kelayakan penerima manfaat.

Walaupun demikian, ditemukan kendala berupa penerima yang enggan mengundurkan diri meskipun kondisi ekonominya telah membaik. Kendala ini bukan akibat lemahnya pemantauan, tetapi lebih pada resistensi individu terhadap mekanisme keluar dari program. Secara keseluruhan, mekanisme pemantauan program PKH di Desa Mandingin dapat dikategorikan efektif, karena dilaksanakan sesuai standar, sistematis, dan mampu memberikan kontrol terhadap implementasi program. Secara keseluruhan PKH yang dilaksanakan di Desa Mandingin memberikan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat disana. Penerima manfaat PKH di Desa Mandingin menyampaikan bahwa bantuan ini membantu meringankan biaya pendidikan anak, kebutuhan lansia, serta kebutuhan sehari-hari. Meski tidak mengatasi seluruh masalah ekonomi, bantuan PKH efektif mengurangi beban keluarga miskin.

4. Kepuasan Penerima Manfaat

Pada indikator kepuasan penerima manfaat terhadap program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan teori efektivitas Budiani menunjukkan bahwa penerima manfaat merasakan kepuasan dalam Program Keluarga Harapan. Hal ini terlihat dari wawancara bahwa Program Keluarga Harapan meringankan biaya sekolah anak seperti pembelian alat tulis dan seragam sekolah, kemudian pada aspek kesejahteraan sosial yang membantu dalam mengurangi beban Keluarga miskin.

Secara keseluruhan kepuasan penerima manfaat di Desa Mandingin dari respon mereka bahwa pada mencapai tingkat yang baik, didorong oleh relevansi bantuan dengan kebutuhan mendesak Pendidikan dan lansia. Kepuasan penerima manfaat ini menjadi fondasi dalam efektivitas Program Keluarga Harapan, tetapi memerlukan penguatan kondisional agar menghindari kurang berkembangnya ekonomi penerima manfaat

5. Efisiensi Sumber Daya

Pada efisiensi sumber daya berdasarkan hasil penelitian menunjukan rendah hal ini terlihat dari beban kerja pendamping PKH yang berlebih. Kepala Desa Khairani menyoroti bahwa kunjungan rumah ke 82 KK sering terhambat cuaca hujan dan genangan jalan, menyebabkan keterbatasan waktu dan tenaga hingga pendamping kewalahan. Pernyataan ini diperkuat perangkat desa Azmi Arianti yang menyatakan sarana prasarana memadai namun SDM minim, sehingga pendamping terbatas dan masyarakat terpaksa datang sendiri ke kantor desa untuk informasi PKH.

Kemudian keseluruhan indikator efektivitas program menurut budiani terhadap PKH di Desa Mandingin menunjukkan hasil yang kuat pada aspek ketepatan tujuan, proses pelaksanaan yang benar dan perubahan yang dirasakan oleh penerima manfaat. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam aspek pendataan sasaran, efektivitas program secara umum tetap berada pada kategori baik. Program PKH terbukti mampu memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan memperbaiki sistem pendataan dan meningkatkan kesadaran penerima manfaat agar mematuhi mekanisme *graduation*, efektivitas program berpotensi meningkat secara signifikan.

Selanjutnya pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandingin menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Efektivitas suatu program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam mengoptimalkan faktor pendukung sekaligus meminimalkan hambatan yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung dan penghambat PKH dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Faktor Pendukung

1) Komitmen Pemerintah Desa dan Pendamping PKH

Kepala Desa menyatakan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program. Dukungan ini mencakup koordinasi administrasi, sosialisasi, fasilitasi data, hingga monitoring bersama. Komitmen ini memperkuat struktur kelembagaan program, sehingga proses pendataan, verifikasi, dan sosialisasi dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan perspektif efektivitas program, dukungan kelembagaan menjadi faktor penting yang mempercepat pencapaian tujuan karena adanya konsistensi peran dan kerjasama berbagai pihak.

2) Sinergi dan Koordinasi antar elemen Pelaksana

Perangkat desa dan pendamping PKH menekankan pentingnya koordinasi yang harmonis. Kerja sama antara pendamping PKH, aparat desa, RT, serta lembaga terkait menjadi pilar utama dalam memastikan kelancaran administrasi dan sosialisasi program.

Kordinasi merupakan syarat penting dalam implementasi kebijakan publik. Kerjasama lintas pelaksana memungkinkan alur pelaksanaan berjalan seragam, mengurangi duplikasi kerja dan meminimalkan kesalahan pendataan

3) Partisipasi aktif masyarakat

Pendamping PKH menyebutkan bahwa tingginya respons dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendampingan dan edukasi menjadi faktor positif. Partisipasi aktif menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap program, sehingga mempermudah implementasi, monitoring, serta perubahan perilaku yang diharapkan dari penerima manfaat.

4) Ketersediaan sarana dan prasarana sosialisasi

Ketersediaan lokasi pertemuan, alat komunikasi, dan media informasi menjadi faktor yang mendukung keberhasilan sosialisasi. Sarana yang memadai memungkinkan penyampaian informasi lebih efektif, sehingga memperkuat pemahaman masyarakat terkait mekanisme program.

Sarana fisik merupakan faktor pendukung yang berkontribusi pada kelancaran operasional dan kualitas pelayanan program

2. Faktor Penghambat

1) Ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada data penerima manfaat. Data yang tidak tepat sasaran menyebabkan Keluarga miskin tidak tercover, sementara Keluarga yang relatif mampu tetap menerima bantuan.

Ketidaktepatan sasaran ini menghambat efektivitas karena tujuan program untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan menjadi tidak optimal. Validitas data merupakan fondasi dari program berbasis verifikasi seperti PKH.

2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang tujuan program

Beberapa penerima manfaat kurang memahami bahwa PKH bukanlah bantuan permanen, melainkan program yang menuntut komitmen terhadap syarat tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah. Kurangnya pemahaman ini memunculkan ketergantungan dan bahkan sikap pasif dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

Rendahnya pemahaman menjadi penghambat yang mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program.

3) Keterbatasan waktu dan tenaga pendamping PKH

Pendamping PKH mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat yang banyak tidak sebanding dengan kapasitas pendamping. Hal ini menyebabkan pendamping tidak dapat melakukan pendampingan secara intensif, terutama dalam memberikan edukasi mendalam atau memantau kondisi setiap penerima manfaat.

Keterbatasan ini mengakibatkan beberapa penerima bantuan kurang terpantau dengan baik sehingga program sulit mencapai dampak maksimal

4) Perubahan mekanisme program yang membingungkan

Penerima manfaat mengeluhkan perubahan teknis pencairan bantuan yang tidak selalu mudah dipahami. Ketidakstabilan mekanisme menyebabkan mereka kesulitan beradaptasi dan rentan melakukan kesalahan administratif.

Dalam konteks program nasional seperti PKH, perubahan kebijakan yang tidak disertai sosialisasi menyeluruh berpotensi menurunkan efektivitas implementasi di tingkat desa

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mandi ngin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat pada setiap prosesnya. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan PKH di Desa Mandingin dapat dikatakan efektif meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek keandalan pendataan, mekanisme evaluasi kelayakan penerima dan efisiensi sumber daya yang masih rendah.

Melihat hal ini efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin apabila dilihat melalui teori budiani dalam (Pertwi dan Nurcahyanto, 2017) cukup efektif hal ini karena masih terdapat dua indikator yang belum efektif seperti ketepatan sasaran yang menunjukkan bahwa administrasi data penerima manfaat yang masih belum update sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, kemudian dalam indikator efisiensi sumber daya yang masih rendah dari pendamping PKH yang kewalahan melakukan kunjungan kepada penerima manfaat berjumlah 82 KK. Namun tiga indikator lainnya dinilai efektif seperti ketepatan tujuan yang menunjukkan bahwa tujuan dari program PKH yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat telah dirasakan oleh mereka, begitupula pada indikator proses pelaksanaan yang benar dan kepuasan penerima manfaat yang merasakan dari adanya Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

SIMPULAN

Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Mandingin terdapat dua indikator yang belum efektif seperti ketepatan sasaran dan efisiensi sumber daya, kemudian tiga indikator efektivitas program lainnya efektif seperti ketepatan tujuan, proses pelaksanaan yang benar dan kepuasan penerima manfaat. Pada pelaksanaan PKH terdapat faktor pendukung yang meliputi komitmen pemerintah desa dan pendamping PKH, sinergi dan koordinasi antar elemen, partisipasi aktif dan ketersediaan sarana prasarana. Kemudian faktor penghambat meliputi data yang tidak update, rendahnya pemahaman masyarakat tentang tujuan program, keterbatasan waktu dan tenaga, dan perubahan mekanisme program yang membingungkan.

Berdasarkan hal tersebut kepada kepala desa dan pendamping PKH perlu melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, begitu pula Dinas Sosial lakukan audit data lokal setiap enam bulan untuk memastikan ketepatan sasaran ditingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (2021) *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan (2021) *Pedoman {Pelaksanaan} {Pembinaan} {Narapidana}*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Hidayatulloh, A.N. (2020) 'Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat dalam Kajian Program Keluarga Harapan: Tinjauan Empirik Dampak Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Penerima Manfaat'.

Maipita, I. (2014) *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Ed.1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Matthew B. Miles and A. Michael Huberman (1992) *Analisis Data Kualitatif*. Terjemah T. Jakarta: UI Press.

Mubyarto (2010) *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3SS.

Pertiwi, M. and Nurcahyanto, H. (2017) 'EFEKTIVITAS PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Sronдол)', *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), pp. 416–430. Available at: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16050>.

Purwanto, S.A., Sumartono, S. and Makmur, M. (2014) 'Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)', *Journal of Social and Humanity Studies* [Preprint].

Sugiyana, R., Kurniansyah, D. and Rizki, M.F. (2021) 'EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2827>.

Sugiyono (2008) *Metode Penelitian: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cet. 6. Bandung: Alfabeta.

Tengah, B.P.S.K.H.S. (2025) *Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2025*. Hulu Sungai Tengah: BPS Hulu Sungai Tengah.